

Baznas Sultra Salurkan Bantuan Bibit Bawang Merah untuk Petani di Bombana

Bombana, sultranet.com - Sebagai tindak lanjut dari program Kampung Zakat yang diluncurkan pada November 2024 lalu di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan bibit bawang merah sebanyak 100 kg kepada Kelompok Tani Pucuk Perintis. Bantuan ini diterima langsung oleh Ketua Kelompok Tani, Bustam, dalam acara serah terima yang turut disaksikan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Rumbia Tengah, penyuluh pertanian, kepala dusun Desa Tapuahi, serta perwakilan Baznas Kabupaten Bombana. Kamis (16/1/2025)

Perwakilan Baznas Kementerian Agama Kabupaten Bombana, Bang Muzakir, S.PI., yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Kampung Zakat merupakan program kerja sama antara Kementerian Agama RI, Baznas, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, termasuk ekonomi, dakwah, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemanusiaan.

“Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya dalam budidaya bawang merah. Harapannya, masyarakat yang sebelumnya sebagai penerima zakat (mustahik) bisa bertransformasi menjadi pemberi zakat (muzakki),” ujar Bang Muzakir.

Selain bibit bawang merah dari Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara, petani juga mendapatkan dukungan pupuk dari Baznas Kabupaten Bombana. Muzakir menegaskan pentingnya kerja sama dengan dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian Bombana, agar program ini dapat berjalan berkelanjutan dan semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dengan sinergi yang baik antara Baznas dan pemerintah daerah, kami optimistis program ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Bombana,” tambahnya.

Ketua Kelompok Tani Pucuk Perintis, Bustam, menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Baznas dan Kementerian Agama atas perhatian yang diberikan. Semoga bantuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan anggota kelompok tani,” ungkapnya.

Program Kampung Zakat ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan berbagai inisiatif lain yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi warga Bombana.

Pemkab Bombana Gandeng LBH untuk Berikan Bantuan Hukum Gratis

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2/102 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemberi Bantuan Hukum. Acara berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dengan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum, perwakilan LBH, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Kamis (16/1/2025)

Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memastikan setiap warga miskin mendapatkan akses hukum yang adil dan setara.

“Tidak boleh ada lagi masyarakat miskin yang merasa tidak berdaya menghadapi

permasalahan hukum. Pemerintah hadir untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi,” ujar Edy Suharmanto.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan terus memantau pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, bantuan hukum gratis ini merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan.

Selain itu, Edy Suharmanto mengapresiasi komitmen dan dedikasi Lembaga Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum.

“Tugas ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi saya yakin dengan integritas dan profesionalisme semua pihak, kerja sama ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Perwakilan LBH yang hadir dalam acara tersebut juga menyambut baik kerja sama ini. Mereka menegaskan kesiapannya untuk mendampingi masyarakat dalam berbagai kasus hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan masyarakat Bombana, terutama kelompok rentan dan kurang mampu, dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak. Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan program ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warganya.

DP3A Bombana Gelar Rapat Internal Perdana 2025, Fokus pada Perlindungan Anak dan

Perempuan

Bombana, sultranet.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana menggelar rapat internal perdana tahun 2025 di Aula Dinas DP3A Bombana. Rapat yang dihadiri seluruh pegawai ini dipimpin oleh Kepala Dinas DP3A Bombana, Drs. Abdul Rahman, M.Si., dengan tujuan menyusun strategi dan rencana kerja tahun 2025, serta memperkuat sinergi, kedisiplinan, dan komunikasi antar tim. (15/1)

Rapat internal ini menjadi momentum penting bagi DP3A Bombana untuk mengevaluasi capaian tahun sebelumnya dan menyusun langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Dalam sambutannya, Abdul Rahman menekankan pentingnya kerja sama, kedisiplinan, dan komitmen seluruh pegawai.

“Tahun ini kita harus lebih baik lagi dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, terutama dalam perlindungan anak dan perempuan,” tegas Abdul Rahman. Ia juga menambahkan, “Rapat ini merupakan langkah awal kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat tim. Kami berharap tahun ini menjadi tahun yang produktif dan inovatif bagi DP3A Bombana.”

Rapat tersebut juga membahas berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2025, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi layanan pengaduan masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Abdul Rahman menyatakan bahwa DP3A Bombana akan terus berupaya untuk menjadi lembaga yang responsif dan proaktif dalam menangani isu-isu perempuan dan anak di Kabupaten Bombana.

Selain itu, rapat ini juga menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antar tim. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan prioritas kerja kita. Dengan komunikasi yang baik dan kedisiplinan yang tinggi, kami yakin bisa mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Abdul Rahman.

Dengan semangat baru dan komitmen yang kuat, DP3A Bombana siap menghadapi tahun 2025 dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Rapat internal ini diharapkan

menjadi fondasi untuk mewujudkan program-program yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Inspektorat Bombana Lakukan Reviu Dana JKN di 22 Puskesmas

Bombana, sultranet.com - Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menggelar reviu terhadap Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digunakan oleh 22 Puskesmas di wilayah tersebut. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana pada 6 hingga 14 Januari 2025 dengan tujuan memastikan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku. (15/1)

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menyampaikan bahwa reviu ini dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I beserta tim dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah daerah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dana kapitasi JKN di setiap Puskesmas telah sesuai dengan regulasi. Kami ingin memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Ridwan.

Pengendali Teknis dalam kegiatan ini, Herianto Gazali, S.STP., M.A.P., menambahkan bahwa reviu dilakukan untuk memastikan perhitungan sisa dana kapitasi JKN sesuai dengan sumbernya serta menilai proporsi belanja dana kapitasi.

“Pembagian anggaran harus mengikuti ketentuan, yaitu 75 persen untuk belanja tenaga kesehatan, 13 persen untuk belanja obat dan alat kesehatan, serta 12 persen untuk belanja operasional seperti ATK, barang jasa, dan belanja modal,”

jelasnya.

Lebih lanjut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana JKN. Dengan adanya reviu ini, diharapkan setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat lebih optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya memastikan bahwa penggunaan dana JKN berjalan efektif dan sesuai peruntukannya. Dengan adanya reviu ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh puskesmas sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat kesehatan yang lebih baik.

Polri dan Kementan Percepat Swasembada Jagung 2025

Bombana, sultranet.com - Kementerian Pertanian bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat pencapaian swasembada jagung nasional melalui program tanam jagung 2025. Rapat berlangsung di Pusat Data dan Analisis Kriminal (Pusdaslis) Mabes Polri, Jakarta, pada 13 Januari 2025, dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas Pangan Polri, Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk Polres Bombana yang mengikuti rapat secara virtual melalui zoom meeting di Aula Polres Bombana. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana, serta jajaran pemerintah daerah, seperti Kepala Dinas Pertanian Bombana Sarif, S.H., Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Binnuraeni, Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Bombana, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kabid Perkebunan Dinas Pertanian.

Dalam arahnya, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri menekankan pentingnya optimalisasi manajemen citra Polri menjelang pelaksanaan penanaman jagung serentak yang dijadwalkan pada 16 Januari 2025. Ia meminta seluruh Polda dan Polres untuk mulai menciptakan pemberitaan yang mendukung isu ketahanan pangan.

“Polda dan Polres dapat mulai mempublikasikan berita mengenai pentingnya ketahanan pangan, pemanfaatan lahan oleh Polri, serta keberhasilan personel Polri dalam mendukung program ketahanan pangan,” ujar Irwasum Polri.

Langkah ini bertujuan untuk membangun momentum positif, sehingga pada 16 Januari mendatang, isu penanaman jagung serentak dapat menjadi perhatian nasional dan memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian.

Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan, Polri menjalankan berbagai inisiatif strategis, termasuk pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan pertanian. Personel Polri turut aktif dalam mengelola lahan tidak produktif dengan menanam jagung, padi, dan komoditas lainnya guna meningkatkan produksi pangan nasional.

Tak hanya itu, Polri juga menjalin kemitraan dengan para petani untuk mendorong pengelolaan lahan secara optimal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung nasional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kolaborasi antara Polri, Kementerian Pertanian, dan dinas terkait di daerah diharapkan dapat memastikan keberhasilan program ketahanan pangan ini. Dengan keterlibatan aktif Polri, program penanaman jagung serentak ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas pangan, tetapi juga memperkuat peran kepolisian dalam menjaga ketahanan nasional.

Melalui program ini, Polri menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, khususnya di sektor pertanian. Keberhasilan program ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani dan perekonomian nasional.

Bombana Harmonisasi Dua Raperbup Strategis untuk Tingkatkan PAD

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menggelar forum harmonisasi dua rancangan peraturan bupati (Raperbup) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara. Forum ini berlangsung di ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham Sultra, pada Jumat, 10 Januari 2025.

Dua Raperbup yang dibahas dalam rapat tersebut dinilai strategis dalam memperkuat basis regulasi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Keduanya adalah Raperbup tentang Nilai Sewa Reklame dan Raperbup tentang Besaran Persentase serta Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, Doddy A. Muchlisi, yang hadir memimpin delegasi penda, menegaskan pentingnya forum ini sebagai ajang penyelarasan agar setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Regulasi ini bertujuan untuk memastikan nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, baik pemerintah maupun pelaku usaha memiliki pedoman tarif yang transparan dan adil,” kata Doddy saat memberikan keterangan usai rapat.

Raperbup tentang Nilai Sewa Reklame memang menjadi salah satu agenda utama pembahasan. Pemkab Bombana menilai sektor reklame merupakan salah satu potensi besar untuk mendongkrak PAD. Dengan adanya regulasi baru yang lebih terukur, pemerintah berharap bisa mengoptimalkan kontribusi sektor periklanan secara legal, tertib, dan profesional.

Setelah membahas regulasi reklame, forum harmonisasi berlanjut dengan pembahasan Raperbup tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan NJOP. Raperbup ini hadir sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap perubahan nilai lahan dan properti di wilayah Bombana yang terus berkembang.

Dalam forum tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Sultra memberikan masukan penting, mulai dari aspek substansi, redaksional, hingga sinkronisasi norma hukum dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi ini menjadi tahap krusial sebelum rancangan peraturan disahkan. Kami pastikan bahwa seluruh ketentuan yang diatur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar salah satu perancang dari Kanwil Kemenkumham Sultra.

Tak hanya aspek legal, forum ini juga memperhatikan dimensi sosial ekonomi dari penerapan dua regulasi tersebut. Pemkab Bombana ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam soal kemampuan membayar pajak dan akses informasi yang terbuka.

Selain itu, Pemkab juga menekankan pentingnya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan tidak membebani masyarakat kecil. Dalam rapat, dibahas pula bagaimana NJOP bisa dihitung lebih adil berdasarkan potensi ekonomi lokal dan kondisi ril masyarakat.

Harmonisasi yang dilakukan ini diyakini menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem fiskal daerah. Setelah disahkan, kedua Raperbup tersebut akan menjadi landasan hukum yang memadai bagi upaya peningkatan PAD secara berkelanjutan dan inklusif.

Forum harmonisasi juga mencerminkan arah baru tata kelola pemerintahan Kabupaten Bombana yang makin akuntabel dan responsif terhadap perubahan zaman. Pemkab menyadari bahwa regulasi yang kuat dan selaras dengan hukum nasional merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Ke depan, forum serupa akan terus digelar guna memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat serta mampu mendorong kemajuan wilayah secara kolektif.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Lebih dari sekadar regulasi, ini adalah bagian dari visi besar dalam menjadikan Bombana sebagai daerah yang mandiri secara fiskal, adil dalam pengelolaan pajak, serta inklusif dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

Kesbangpol Bombana Panen Ubi Kayu, Wujudkan Ketahanan Pangan Lokal

BOMBANA, sultranet.com - Keluarga Besar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana yang dipimpin oleh dr. Sunandar, MM.Kes, menggelar panen ubi kayu di kebun milik Kesbangpol pada Jumat, 10 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang digagas untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa tanah berbatu pun bisa diolah dengan baik.

Panen ubi kayu yang dilakukan di lahan seluas kurang lebih 50 x 20 meter itu membuahakan hasil memuaskan. Ubi yang dipanen berukuran besar dengan tekstur yang lembut saat direbus. Kesuksesan panen ini disambut dengan rasa syukur dan semangat kebersamaan oleh para pegawai Kesbangpol yang terlibat langsung dalam prosesnya.

Sekretaris Badan Kesbangpol, Drs. Budiman, MM, yang mengomandoi panen ubi kayu tersebut, tampak aktif mengarahkan para staf. Seseekali, ia melontarkan guyonan yang membuat suasana semakin meriah. Ia juga mengajak semua staf untuk kembali mengolah kebun demi keberlanjutan program ini.

“Teman-teman, minggu depan kita mulai olah kembali kebun ini. Kita akan tanam sayur-sayuran untuk menghadapi puasa Ramadhan. Biasanya di bulan puasa harga sayuran melonjak, jadi mari kita manfaatkan kebun yang ada,” ujar

Budiman.

Program ini bertujuan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan, khususnya dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain sebagai upaya meningkatkan kemandirian pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap pertanian skala kecil.

Dengan adanya panen ini, Kesbangpol Bombana berharap masyarakat bisa terinspirasi untuk memanfaatkan lahan yang tersedia, baik di halaman rumah maupun lahan kosong yang tidak produktif. Budiman menambahkan, pertanian mandiri seperti ini dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Setelah panen, hasil ubi kayu tersebut dibagikan kepada seluruh staf sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Kegiatan ini pun menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dalam lingkungan kerja sekaligus membangun semangat gotong royong dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Bombana.

Disdukcapil Bombana Gandeng Pengadilan Agama Rumbia Permudah Layanan Administrasi via Aplikasi “Munajah Gembira”

Bombana, sultranet.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana resmi berkolaborasi dengan Pengadilan Agama Rumbia untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan terkait pencatatan perkawinan, perceraian, serta dokumen hukum lainnya. Kerjasama ini diwujudkan melalui sosialisasi aplikasi “Munajah Gembira”, sistem terintegrasi berbasis digital yang menghubungkan Kementerian

Agama dengan Disdukcapil Bombana. Sosialisasi digelar Jumat (10/1/2025) dengan melibatkan perwakilan kedua instansi.

Sri Patonah, S.Kom, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Bombana, menjelaskan bahwa aplikasi ini memberikan hak akses khusus (*user*) kepada admin Disdukcapil untuk memverifikasi dan memperbarui data kependudukan secara real-time. “Masyarakat tidak perlu lagi mengantri lama atau mengurus dokumen di dua instansi berbeda. Proses seperti pembuatan akta perkawinan atau perubahan status kependudukan bisa diselesaikan lewat satu platform,” ujarnya dalam sambutan.

Aplikasi “Munajah Gembira” dirancang untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang sering terkendala birokrasi berbelit. Kamariah Sunusi, SH., M.H., Ketua Pengadilan Agama Rumbia, menegaskan bahwa integrasi sistem ini akan memangkas waktu proses administrasi hingga 70%. “Contohnya, jika ada putusan pengadilan terkait perceraian, data langsung terkirim ke Disdukcapil. Masyarakat cukup datang sekali untuk mencetak dokumen resmi,” jelas Kamariah.

Kolaborasi ini juga diharapkan mengurangi kesalahan data kependudukan, seperti ketidaksesuaian nama atau status perkawinan. Menurut Sri Patonah, selama ini banyak kasus dokumen ganda atau tertinggal pembaruan data karena kurangnya koordinasi antarinstansi. “Dengan sistem terpusat, semua pihak bisa memantau dan memperbarui data secara bersamaan. Ini juga meminimalisir risiko pemalsuan dokumen,” tambahnya.

Selain percepatan layanan, aplikasi ini dirancang ramah pengguna dengan fitur notifikasi progres pengajuan dokumen. Masyarakat bisa memantau status permohonan mereka via smartphone. Uji coba aplikasi telah dilakukan sejak Desember 2024, dengan hasil 98% pengguna menyatakan kepuasan atas kecepatan dan kemudahan prosedur.

Ke depan, kedua pihak berencana memperluas fungsi “Munajah Gembira” untuk layanan lain, seperti pengurusan akta kelahiran atau perubahan data kependudukan akibat putusan pengadilan. “Kami juga akan membuka pelatihan bagi masyarakat kurang melek teknologi agar tidak tertinggal dalam memanfaatkan layanan ini,” ujar Kamariah.

Kerjasama ini mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh masyarakat. Ahmad Yani, Ketua LSM Peduli Birokrasi Bombana, menyebut inovasi ini sebagai terobosan

penting. “Selama ini, masalah administrasi sering menjadi beban warga. Dengan digitalisasi, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan karena prosedur yang rumit,” katanya.

Disdukcapil Bombana menargetkan 100% desa/kelurahan di wilayahnya telah terhubung dengan aplikasi ini pada akhir 2025. Untuk tahap awal, sosialisasi akan difokuskan di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Poleang sebagai wilayah dengan permintaan layanan tertinggi.

Bombana Siap Jadi Tuan Rumah Porprov 2026

Sultranet.com, Bombana - Kabupaten Bombana semakin mantap mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Bombana terpilih, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, sesaat setelah penutupan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang digelar oleh KPU Bombana di Gedung Tanduale, Rumbia, Kamis, 9 Januari 2025.

Burhanuddin menyampaikan bahwa Bombana memiliki potensi besar untuk menyukseskan ajang olahraga empat tahunan tingkat provinsi tersebut. Infrastruktur yang terus berkembang, aksesibilitas yang memadai, serta kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang mendukung kesiapan Bombana sebagai tuan rumah.

“Kami sangat berharap Porprov 2026 dapat digelar di Kabupaten Bombana. Ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga peluang besar untuk mempromosikan potensi daerah, seperti sektor pariwisata dan budaya lokal,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan fasilitas olahraga guna mendukung pelaksanaan Porprov. Menurutnya, Bombana telah memiliki venue yang memenuhi standar dan hanya perlu peningkatan di beberapa sarana olahraga.

“Insya Allah setelah pelantikan, kami akan berupaya maksimal mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Venue sudah ada dan memenuhi standar. Tinggal beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan. Di sisi lain, aksesibilitas Bombana cukup baik bagi kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Dukungan masyarakat Bombana juga dinilai menjadi faktor kunci dalam menyukseskan ajang ini. Burhanuddin menilai semangat dan partisipasi masyarakat sangat luar biasa untuk mendukung Bombana menjadi tuan rumah Porprov 2026.

“Kami percaya jika diberi kepercayaan, Bombana mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta dan pengunjung,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, Annisa Sri Prihatin, menyambut baik kesiapan Bombana dalam mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov 2026. Ia menyatakan bahwa ajang ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi dunia olahraga, tetapi juga berkontribusi terhadap sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

“Porprov bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang membangun ekonomi daerah. Dengan adanya ribuan atlet, ofisial, dan wisatawan yang datang, sektor perhotelan, kuliner, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan mendapat manfaat besar,” jelas Annisa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pelaku UMKM dalam penyediaan suvenir khas Bombana serta pengembangan sentra kuliner di sekitar venue pertandingan.

“Kami ingin menjadikan Porprov sebagai ajang untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan kekayaan kuliner Bombana kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, berbagai persiapan akan kami lakukan, termasuk menggandeng UMKM untuk mendukung ekonomi kreatif lokal,” tambahnya.

Porprov Sulawesi Tenggara merupakan ajang olahraga bergengsi yang bertujuan menjaring atlet berbakat dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat daerah. Kegiatan ini juga berperan dalam mempererat persatuan, mengevaluasi pembinaan olahraga, serta mempersiapkan atlet untuk kompetisi nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON).

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Bombana optimistis dapat menjadi tuan rumah yang sukses dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Keputusan resmi terkait lokasi pelaksanaan Porprov 2026 diharapkan dapat segera diumumkan dan berpihak kepada Bombana.

Pisah Sambut Kapolres Bombana, AKBP Wahyu Hadi Resmi Gantikan AKBP Roni Syahendra

Bombana, sultranet.com - AKBP Wahyu Hadi, SIK., MIK resmi menjabat sebagai Kapolres Bombana menggantikan AKBP Roni Syahendra, SH., SIK., M.Si dalam acara pisah sambut yang digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Bombana, Rabu, 8 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh Penjabat Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes, Sekretaris Badan Kesbangpol, Drs. Budiman, MM, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, mengapresiasi dedikasi dan pengabdian AKBP Roni Syahendra selama menjabat sebagai Kapolres Bombana. "Kami berterima kasih atas kerja keras beliau dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Wonua Bombana. Semoga di tempat tugas yang baru, beliau semakin sukses," ujar Edy. Ia juga menyambut hangat AKBP Wahyu Hadi dan berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, juga memberikan apresiasi kepada AKBP Roni Syahendra atas kontribusinya dalam pengamanan Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada yang berlangsung kondusif. "Kami harap kerja sama yang sudah baik antara Polres dan pemerintah daerah bisa semakin ditingkatkan untuk memastikan masyarakat Bombana hidup dalam suasana yang

aman dan damai,” kata Sunandar.

AKBP Roni Syahendra dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas sinergi yang telah terjalin dengan Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat selama masa jabatannya. “Saya merasa bangga bisa bekerja bersama jajaran di Bombana. Koordinasi yang baik telah menciptakan situasi yang kondusif, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres baru, AKBP Wahyu Hadi, SIK., MIK, yang merupakan anak asuh AKBP Roni Syahendra saat pendidikan kepolisian, mengaku terharu dengan sambutan yang diberikan. “Pisah sambut ini berlangsung penuh khidmat dan sangat menghibur dengan adanya persembahan lagu dari keluarga besar Polres Bombana. Saya merasa seperti di rumah sendiri,” ujarnya.

AKBP Wahyu Hadi telah berkeluarga dan memiliki dua anak yang saat ini masih bersekolah di Jawa. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah berjalan serta memperkuat sinergi antara Polres Bombana dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Acarapisah sambut ini menjadi momen haru dan penuh kehangatan bagi seluruh peserta yang hadir. Kegiatan diakhiri dengan pemberian cendera mata kepada AKBP Roni Syahendra sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya selama bertugas di Bombana.